

Persepsi Publik Terhadap Kebijakan Penutupan Lokalisasi Prostitusi Tanjung Elmo di Kabupaten Jayapura

Fitrine Christiane Abidjulu
Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Cenderawasih
fitrine@yahoo.com

Abstrak

Warga Jayapura yang tinggal di Tanjung Elmo khawatir dengan kegiatan prostitusi di sana. Keberadaan Prostitusi di Tanjung Elmo langsung berdampak pada masyarakat di Kampung Waena, Yoka, Puay, Ayapo, Small Asei, Kampung Harapan, Noulla, Telaga Maya dan Danau Ria. Pemerintah Kabupaten Jayapura lalu berinisiatif menutup Prostitusi di Tanjung Elmo. Dasar dari kebijakan tersebut adalah pendapat dan opini masyarakat yang dikumpulkan pemerintah dalam diskusi publik. Tulisan ini akan mengungkapkan pendapat dan persepsi masyarakat terhadap penutupan Prostitusi Tanjung Elmo melalui metode *Focus Group Discussion* (FGD).

Kata kunci : Persepsi Publik, Prostitusi, Tanjung Elmo, Kabupaten Jayapura

Abstract

People of Jayapura who live in Tanjung Elmo are worried about prostitution there. The existence of Prostitution in Tanjung Elmo directly affected the people in Waena, Yoka, Puay, Ayapo, Small Asei, Kampung Harapan, Noulla, Telaga Maya and Danau Ria. Government of Jayapura Regency then took an initiative to close Prostitution at Tanjung Elmo. The policy is build upon opinion from people who live in Tanjung Elmo area, which is collected by the government in public discussions. This article will reveals the opinions and public perceptions from people in Tanjung Elmo area about the closure of Tanjung Elmo Prostitution through the Focus Group Discussion (FGD) method.

Keywords: Public Perception, Prostitution, Tanjung Elmo, Jayapura Regency

Pendahuluan

Prostitusi adalah salah satu penyakit masyarakat atau patologi sosial (Kartono, 2005) yang menjadi masalah sosial dan meresahkan masyarakat. Prostitusi (pelacuran) dipraktikkan di berbagai tempat, baik dilakukan secara mandiri maupun yang diproteksi pemerintah atau negara.

Dewasa ini praktek prostitusi semakin canggih karena didukung oleh perkembangan teknologi yang semakin maju. Prostitusi bisa dilakukan antar daerah maupun antar negara dengan bantuan teknologi dan internet sehingga bisa tercipta prostitusi online (daring).

Baik prostitusi online maupun offline (luring), keduanya bisa menimbulkan

dampak yang merugikan, seperti penularan HIV/AIDS, sipilis serta penularan penyakit seksual lainnya. Dampak negatif lain dari prostitusi adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, perceraian, aborsi, dan putus sekolah bagi anak usia sekolah yang ikut terjerumus dalam praktik prostitusi (lih. Mamahit&Sedyaningsih, 2010; Punomo&Siregar, 1983).

Dampak negatif yang dihasilkan oleh praktik prostitusi juga dirasakan oleh penduduk Tanjung Elmo Hubai, Kabupaten Jayapura yang merupakan wilayah lokalisasi atau prostitusi.

Dampak negatif yang paling terlihat adalah keresahan penduduk yang mendiami Kampung-Kampung dan Distrik yang tersebar di kawasan Timur Danau Sentani. Penduduk kawasan timur Sentani yang diprediksi menerima dampak dari praktek tersebut adalah penduduk yang mendiami kampung-kampung Waena, Yoka, Puai, Ayapo, Asei Kecil, Netar, Kampung Harapan, Noulla, Telaga Maya, Telaga Ria, Jembatan dua dan penduduk lainnya.

Pemerintah Kabupaten Jayapura, baik Badan Eksekutif maupun Legislatif serta Tokoh-Tokoh Masyarakat, telah menyadari dampak negatif serta keresahan penduduk atas praktik prostitusi yang terselenggara di Tanjung Elmo. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Jayapura beserta aparaturnya memberlakukan kebijakan untuk menutup praktik prostitusi atau lokalisasi di wilayah Tanjung Elmo.

Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Jayapura yang maju dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rencana pembangunannya, Kabupaten Jayapura memang dipersiapkan untuk menuju kota mandiri, maju sejahtera dan tertata indah.

Berdasarkan rencana pembangunan tersebut, maka Pemerintah dan masyarakat berupaya untuk mengatasi dan menanggulangi semua problema sosial yang muncul, salah satunya dengan menutup praktik prostitusi di Kabupaten Jayapura.

Demi melaksanakan kebijakan tersebut, pemerintah membutuhkan dasar untuk mendukung kebijakan penutupan lokalisasi di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, tulisan ini membahas persepsi publik tentang praktik prostitusi di wilayah Tanjung Elmo. Hasil dari persepsi ini

yang kemudian menjadi salah satu dasar bagi Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk menutup praktik prostitusi di daerah tersebut.

Metode

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif naturalistik. Data primer yang digunakan dalam tulisan ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi. Kemudian data sekunder diambil dari studi dokumentasi. Subjek yang akan diteliti adalah PSK (Pekerja Seks Komersial), Mucikari, Pengusaha, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat sebanyak 10 orang dengan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling (lih. Suharsimi, 2010 dan Hadi, 2001)

Hasil dan Pembahasan

Lokalisasi di Kabupaten Jayapura tempat Pekerja Seks Komersial (PSK) melakukan praktik prostitusi terletak di Tanjung Elmo. Lokasi ini strategis karena berada di tepi jalan trans kota Jayapura-Sentani atau Sentani-Kota Jayapura. Secara administratif, lokalisasi ini berada di Kampung Asei Kecil Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Lokasi tersebut terletak di atas tanah seluas 9 Ha. Kemudian secara letak geografis, lokasi ini berada di tepi Danau Sentani yang sangat indah dipandang mata.

Secara status kepemilikan, lokasi tersebut termasuk dalam wilayah adat Suku Sentani. Namun khusus untuk tanah seputar lokalisasi sendiri, sudah dialihtangankan dari pihak adat kepada penghuni Tanjung Elmo, terutama Mucikari dan Pengusaha. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pemilikan sertifikat tanah yang menunjukkan kepemilikan yang sah secara adat dan

hukum. Hasil Penelitian Herman Kareth (1978) yang berjudul Masalah Pelacuran dan Beberapa Penanggulangannya di daerah Tingkat II Jayapura, dalam temuannya dari informan kunci pada tahun 1978 menyebutkan bahwa lokalisasi WTS Dati II Jayapura sudah direncanakan dibangun di Tanjung Elmo- Hubai Desa Dabohaley Jaya Kecamatan Sentani diatas tanah seluas 9 Ha.

Tanjung Elmo Hubai terletak di tepi danau Sentani. Pada saat lokalisasi tersebut mulai dibangun dan sudah ada PSK yang lebih dahulu menghuninya. Setelah bangunan seluruhnya selesai, diberlakukan penertiban terhadap para PSK, sehingga para PSK dapat ditampung di lokalisasi tersebut.

Dokumen akademik yang berupa hasil penelitian memberi pencerahan bahwa lokalisasi sebagai wujud peran serta msayarakat adat. Penyerahan dilakukan pada tahun 1978 kepada para mucikari dan dibangun atas ijin pemerintah Kabupaten Jayapura. Lokalisasi ini tidak dibangun oleh pemerintah, tetapi atas kerjasama mucikari sehingga dapat digunakan untuk praktek prostitusi secara terkendali dalam lokalisasi. Pada saat itu praktek prostitusi tidak dilakukan dilokalisasi tetapi terpencar-pencar atau terselubung.

Herman Kareth (1978) menunjukkan bahwa praktek prostitusi dilakukan terpencar-pencar di beberapa lokasi yakni Argapura dekat Dusun Sagu, Hamadi di seputar pertigaan dan di Polomo Sentani. Hal ini menunjukkan bahwa selain praktik di lokasi tetap, para PSK juga melakukan praktik prostitusi secara terselubung di tempat-tempat tertentu.

Praktik prostitusi di Lokalisasi Tanjung Elmo sudah dilakukan selama 37 tahun (sejak tahun 1978-2015). Bila dianalisis *cost-benefit* atau biaya/modal yang dikeluarkan serta keuntungan yang

didapat oleh puluhan bahkan ratusan PSK, mucikari, pengusaha dan pekerja sangat besar keuntungannya. Namun dibalik itu efek atau dampak penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS pun sudah banyak pula. Mendasari pemikiran tersebut, sudah saatnya pemerintah menetapkan kebijakan penutupan. Khusus penutupan praktek prostitusi sebagai suatu langkah terpuji. Hal ini sebagai upaya menuju tahun 2019 Indonesia Bebas Prostitusi.

Persepsi Pekerja Seks Komersial (PSK) Terhadap Penutupan Praktek Prostitusi di Tanjung Elmo

Wacana penutupan Lokalisasi Tanjung Elmo menimbulkan respon atau tanggapan terhadap hal tersebut. Persepsi yang muncul berbeda-beda dimana respon PSK tentang Kebijakan Penutupan Praktek Prostitusi di Tanjung Elmo pada dua sumber. Sumber pertama pelaksanaan FGD pada dua tempat yaitu di Waena di halaman rumah salah satu informan Dewan Adat Suku Sentani (DASS) dan di Kampung Harapan terpusat di rumah Balai Adat Ondoafi. Hal ini serentak dilakukan pada tanggal 11 Juni 2015.

PSK yang diwakili memberi respon bahwa Lokalisasi Tanjung Elmo telah diijinkan pemerintah dan diperuntukan bagi praktek lokalisasi untuk memudahkan pelayanan kesehatan dan penanganan penularan penyakit HIV/AIDS. Pelayanan kesehatan dilakukan secara terkendali oleh Pos Klinik PKBI dan KPA. PSK mendapat pelayanan menggunakan kondom dan obat anti kekebalan HIV/AIDS atau Anti Retro Viral (ARV). Kasus penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Jayapura dan Provinsi Papua tidak ditularkan dari praktek prostitusi di Tanjung Elmo. Lokalisasi yang sudah terkendali dalam pelayanan kesehatan ditutup sedangkan

praktek prostitusi terselubung di Bar, Diskotik, Hotel, tempat Pijat dibiarkan. Praktek prostitusi seperti itu berpeluang terjadi penularan HIV/AIDS dan tidak setuju menerima kebijakan penutupan yang dilakukan mendadak. Rasionalnya dilakukan melalui tahapan-tahapan seperti sosialisasi penyadaran, waktu pembinaan persiapan untuk kembali ke daerah asal, barulah dilakukan pemulangan dengan memberi biaya masa tunggu untuk mencari pekerjaan.

Sedangkan data dan informasi yang diperoleh dari diskusi kelompok dengan PSK, tanggal 11 Juni 2011, yaitu Pelayanan kesehatan di Lokalisasi terkendali dilakukan melalui klinik kesehatan, PKBI dan KPA. PSK saat menerima tamu atau pasangan wajib menggunakan perlengkapan seperti kondom dan obat anti kekebalan HIV/AIDS. PSK yang terinfeksi HIV/AIDS berjumlah 18 orang tetap mendapat pelayanan medis sehingga walaupun menerima tamu (berhubungan seksual) tidak terjangkit penyakit HIV/AIDS. Kebijakan pemerintah Kabupaten Jayapura terkesan mendadak atau dipaksakan. Seharusnya dilakukan melalui tahapan-tahapan seperti sosialisasi penyadaran. Sesuai ungkapan diskusi bahwa mereka akan pulang sendiri dan dengan biaya sendiri, tidak dipaksakan pemerintah.

Mucikari atau germo sebagai pihak yang mengkoordinir, mendatangkan PSK dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui transaksi dalam proses bisnis prostitusi di Lokalisasi Tanjung Elmo. Rekaman data di lokalisasi bahwa mucikari berjumlah 33 orang, diantaranya pasangan suami isteri sebanyak 11 pasang, membawahi 25 wisma. Mucikari tersebut juga bertindak sebagai pemilik wisma atau rumah/tempat dilakukan transaksi prostitusi. Tiap

mucikari mempunyai PSK bervariasi antara 2 hingga 24 orang. Mucikari akan mendapatkan keuntungan dari setiap kali transaksi praktek prostitusi.

Persepsi Mucikari tentang Kebijakan Penutupan Praktek Prostitusi di Tanjung Elmo

Respon dari mucikari yang disampaikan berturut-turut pada pertemuan: FGD dan Pertemuan Kelompok dan Pendekatan Individu dengan Mucikari. FGD yang dilakukan pada tanggal 11 Juni 2015 di Waena dan Kampung Harapan. Mucikari berkesempatan menyatakan sikapnya sebagai berikut: Pemerintah telah mengizinkan praktek prostitusi di Kabupaten Jayapura. Hal tersebut terbukti dengan pembangunan Lokalisasi Prostitusi oleh Mucikari di Tanjung Elmo. Kemudian praktek prostitusi di lokalisasi mudah dikendalikan dan diberikan pelayanan kesehatan secara teratur dan kontinyu sehingga alasan penutupan tidak rasional.

Lokalisasi Tanjung Elmo menjadi sorotan utama sedangkan praktek prostitusi terselubung dibiarkan bebas. Melakukan praktek prostitusi yang mudah terjadi penyebaran HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya. Berikutnya dilakukan Pertemuan dan pendekatan ini dilakukan pada tanggal 2 Juli 2015. Ungkapan hati mendalam yang disampaikan, bahwa: praktek prostitusi dilokalisasi terkendali dan memudahkan pelayanan kesehatan. Penularan HIV/AIDS di Papua bukanlah bersumber dari PSK Tanjung Elmo saja. Kebijakan penutupan lokalisasi terkesan dipaksakan tidak diawali dengan tahapan-tahapan pembinaan seperti: sosialisasi penyadaran, pembinaan kegiatan ketrampilan dan ekonomi kreatif sebagai bekal untuk melakukan pekerjaan lain di daerah asal. Bila lokalisasi ditutup, kami akan pulang

sendiri dengan biaya sendiri pula, tidak perlu dipulangkan oleh pemerintah, dan pemerintah memberikan biaya masa tunggu untuk mencari pekerjaan Rp30.000.000,- (Tiga puluh Juta Rupiah). Argumen bahwa dana untuk membuka usaha lain dan kami juga adalah warga Negara RI yang perlu menata hidup.

Persepsi Tokoh Masyarakat Sekitar Lokalisasi Tentang Dampak Praktek Prostitusi dan Kebijakan Penutupan Praktek Prostitusi Tanjung Elmo

Respon dari masyarakat sekitar lokalisasi dan Kabupaten Jayapura yang dijangkau melalui FGD pada dua(2) tempat terpisah yaitu di Waena dan Di Nolakla menyatakan pemikiran dan saran tindak lanjut sebagai berikut : PSK atau lokalisasi pada sisi mana orang memandang Prostitusi, jelasnya adalah dosa dan merugikan orang banyak, oleh sebab itu dari sisi kemanusiaan, perlu dicari jalan terbaik. Tentunya perlu dilakukan pembinaan sehingga pada saatnya mereka sadar dan kembali ke daerah asalnya.

Dari pemikiran tersebut dapat dianalisis bahwa masalah prostitusi adalah satu problema sosial yang semakin pesat perkembangannya. Hal ini bertentangan dengan norma-norma susila/etika dan nilai-nilai keagamaan. Dengan kehadiran PSK di Kota Jayapura dapat merusak nilai-nilai keagamaan.

Pernyataan berikutnya yang disampaikan menyorot pada faktor kemanusiaan, karena mereka juga ditipu, diajak oleh mucikari dan datang ke Jayapura untuk bekerja, nyatanya ditempat baru itu dilakukan praktek prostitusi. Oleh sebab itu dari sisi kemanusiaan, perlu dilakukan penyadaran, pembinaan keterampilan sehingga bila dipulangkan sudah mempunyai bakat

untuk melakukan pekerjaan halal yang terpuji.

Pemikiran yang disampaikan terkait dengan status tanah di Tanjung Elmo, sudah dimiliki oleh mucikari dan pengusaha. Buktinya ada sertifikat dan jenis-jenis usaha : kios, tempat cuci, warung makan, keramba dan lain-lain. Tempat itu diberikan/ dikontrak selama 20 tahun –ada masa Bupati Thontje Meset dan Bupati Karafir sudah ada upaya penutupan, namun mereka berusaha kembali lagi melakukan praktek prostitusi. Pemikiran saya, Bupati sekarang tetap melakukan tindakan untuk pemulangan, dan beri uang jaminan usaha, misalnya tiap orang diberikan Rp5.000.000-Rp10.000.000,-. Dilanjutkan pula dengan aturan yang ketat seperti Peraturan Daerah (PERDA) tentang Larangan Praktek Prostitusi.

Pernyataannya bahwa mendukung Bupati, DPRD, Tokoh masyarakat agar praktek prostitusi harus ditutup. Ditetapkan melalui PERDA sebagai landasan hukum.

Pemerintah Kabupaten Jayapura sudah membuat pernyataan pemulangan dan praktek prostitusi ditutup, sesuai hasil rapat dengan Ondoafi, Kepala suku harus ditutup. Ada teman-teman di SATPOL/PP Kabupaten Jayapura sudah 10 orang yang meninggal karena selalu berhubungan seks dengan PSK. Sesuai pendekatan yang dilakukan, para PSK sudah sepakat untuk pulang, yang masih keberatan adalah mucikari. Mucikari keberatan karena kehilangan tempat makan, usaha jadi tetap ditindak untuk menghentikan praktek prostitusi. Contohnya kabupaten Jayawijaya sudah pulangkan 50 orang PSK. Pulangkan PSK dan mucikari serta tempat tersebut segera dibangun tempat objek wisata. Kabupaten Jayapura harus bersih, indah dan nyaman.

Respon Dewan Adat Suku Sentani Tentang Dampak Praktek Prostitusi dan Penutupan Praktek Prostitusi Tanjung Elmo

Dewan Adat Suku Sentani mengatakan bahwa semua masyarakat Sentani mendukung kebijakan pemerintah menutup lokalisasi. Berbagai kegiatan lainnya seperti kegiatan ekonomi dan sosial boleh dilanjutkan tetapi praktek prostitusi harus ditutup. Walaupun lokalisasi Tanjung Elmo sudah diserahkan oleh orang tua-orang tua dulu dan bukti hukumnya ada di pemerintah, tapi dari pandangan adat bahwa tempat-tempat seperti lokalisasi Tanjung Elmo tidak boleh ada di lingkungan masyarakat karena akan berdampak bagi kehidupan generasi muda.

Masyarakat adat mendukung kebijakan Pemerintah tentang penutupan Lokalisasi Tanjung Elmo, karena adat tidak memakai perempuan sebagai objek untuk mencari pendapatan daerah atau mencari pendapatan lainnya. Secara adat hal tersebut tabu. Dulu sosialisasi diberikan untuk para PSK dengan memberikan pelatihan jahit menjahit dan masak memasak. Lokalisasi Tanjung Elmo harus segera ditutup atau dipindahkan untuk melindungi generasi muda Jayapura terhindar dari HIV/AIDS.

Penutup

Dari semua pemikiran yang disampaikan dapat disimpulkan yaitu semua pihak mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Jayapura untuk menutup lokalisasi Tanjung Elmo dengan persepsi bahwa lokalisasi tidak sesuai dengan agama dan dilarang keras oleh adat.

Daftar Pustaka

- Hadi S., (2001). *Metode Research:Jilid I*. Yogyakarta, Indonesia: ANDI.
- Kareth H., (1978). *Masalah Pelacuran dan Beberapa Penanggulangannya di daerah Tingkat II Jayapura*. Jayapura, Indonesia: FISIP UNCEN.
- Kartono K., (2005). *Patologi Sosial*. Jakarta, Indonesia: PT Rajagrafindo Persada.
- Mamahit&Sedyaningsih E.R, (2010). *Perempuan-Perempuan Kramat Tunggak*. Jakarta, Indonesia: KPG.
- Purnomo Tj.& Siregar A. (1983). *Dolly: Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*. Jakarta, Indonesia: Grafiti Pers.
- Suharsimi A., (2010). *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Indonesia: Renika Cipta.
- Walgito B., (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Indonesia, Yogyakarta: ANDI.

